



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Temuan BPK, Tunggakan Sewa Lahan Rp400 Juta**

**Izin Dicabut, Sewa Tetap Wajib Bayar**

**BENGKULU** - Sembilan tahun tidak membayar biaya sewa lahan, akhirnya Dinas Pariwisata Kota Bengkulu bersikap tegas. Izin usaha CV Mitra Bengkulu Wisata akhirnya dicabut. Meskipun izin usaha telah dicabut, namun Dinas Pariwisata tetap memastikan kalau CV Mitra Bengkulu Wisata tetap harus membayar sewa lahan yang mencapai Rp 400 juta.

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Amrullah mengatakan pencabutan izin penggunaan lahan oleh CV Mitra Bengkulu Pariwisata sebulan yang lalu sudah melalui prosedur dari teguran pertama sampai teguran ketiga dan hasilnya, tidak ada sikap kooperatif dari pihak CV tersebut. Ditegaskannya, pencabutan ini hanyalah sanksi administratif, sementara kewajiban biaya sewa lahan tetap wajib dibayar.

"Secara hukum mereka tetap harus membayar karena dalam perjanjian pemerintah memberi izin lokasi usaha dia bersedia membayar sewa lahan namun dalam realisasi tidak kooperatif. Dari audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ada kerugian negara sekitar Rp 400 juta dari aktifitas sewa lahan," jelasnya.

Selain itu, ada beberapa hotel dan kafe yang menjadi temuan BPK, seperti Kafe Cemara, Kafe Casablanca, Kafe Malibu, Marina Hotel, Royal Hotel, dan Hotel Bougenville. Antara lain yang telah melakukan angsuran pembayaran seperti Kafe Malibu, Marina Hotel, Royal Hotel, sedang Kafe Casablanca dan Hotel Bougenville masih meminta tenggang waktu pembayaran.

"Kita terus melakukan penagihan terhadap hotel maupun kafe yang menunggak dan memberi kesempatan kepada mereka yang masih ada itikad ingin membayar, sebelum kita melakukan pencabutan izin," ujarnya.

Sementara itu PAD dari sewa lahan di Jalan Pariwisata Pantai Panjang hingga saat ini baru mencapai Rp

450 juta. dipredikasi hingga akhir tahun akan bertambah jika tunggakan tersebut dibayarkan pihak yang menggunakan lokasi sewa lahan.

"Kita tahun ini tidak ada target

karena pandemi Covid-19, kalau mengacu tahun sebelumnya Rp 350 juta pertahun artinya kita sudah melampaui target," terangnya. (juu)